

UPAYA INDONESIA MENYEIMBANGKAN KEBIJAKAN PROTEKSIONISME DAN LIBERIALISASI PERDAGANGAN

Afifah Nuraini, Fadhli Suko Wiryanto, Muhammad Faiz Andeaz Fawwaz

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email : 2310116033@gmail.com, fadhlisukowiryanto@upnvj.ac.id,
mfaizandreazf@upnvj.ac.id,

Abstrak

Penelitian ini membahas strategi Indonesia dalam menyeimbangkan kebijakan proteksionisme dan liberalisasi perdagangan di tengah dinamika global. Proteksionisme dipandang penting untuk melindungi industri domestik melalui instrumen tarif, subsidi, maupun regulasi non-tarif, sementara liberalisasi diperlukan guna meningkatkan efisiensi, daya saing, serta memperluas akses pasar global. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka, penelitian ini menemukan bahwa pemerintah Indonesia mengkombinasikan kedua pendekatan secara adaptif. Proteksi diterapkan pada sektor strategis, sementara insentif dan kemudahan diberikan pada sektor ekspor unggulan. Selain itu, sinergi kebijakan perdagangan dengan kebijakan moneter turut memperkuat stabilitas ekonomi nasional. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara proteksionisme dan liberalisasi menjadi strategi efektif untuk menghadapi tantangan perdagangan internasional sekaligus menjaga kepentingan nasional.

Kata Kunci : Proteksionisme, Liberalisasi Perdagangan, Kebijakan Ekonomi

Abstract

This study discusses Indonesia's strategy in balancing protectionism and trade liberalization policies amid global dynamics. Protectionism is considered important to protect domestic industries through tariffs, subsidies, and non-tariff regulations, while liberalization is necessary to improve efficiency, competitiveness, and expand access to global markets. Using a descriptive qualitative method based on literature review, this study finds that the Indonesian government combines both approaches adaptively. Protection is applied to strategic sectors, while incentives and facilities are provided to leading export sectors. In addition, the synergy between trade policy and monetary policy strengthens national economic stability. The findings of this study indicate that the balance between protectionism and liberalization is an effective strategy for facing international trade challenges while maintaining national interests.

Keyword : Protectionism, Trade Liberalization, Economic Policy,

Article history

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

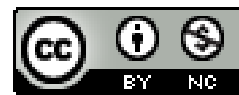
Plagirism checker no 1292

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Pendahuluan

Perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama penggerak pertumbuhan ekonomi global saat ini. Arus globalisasi telah membuka kesempatan luas bagi setiap negara untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi produksi, serta memaksimalkan keuntungan dari keunggulan komparatif. Meski demikian, keterbukaan ekonomi juga membawa tantangan, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia yang masih berusaha memperkuat fondasi industrinya. Kondisi ini menimbulkan dilema bagi pemerintah, yaitu antara mempertahankan proteksionisme untuk menjaga kepentingan domestik atau melaksanakan liberalisasi perdagangan agar lebih terintegrasi dengan pasar dunia.

Proteksionisme umumnya dijalankan untuk melindungi pasar dalam negeri dari gempuran produk asing yang lebih murah maupun lebih kompetitif. Kebijakan ini diterapkan melalui mekanisme tarif, pemberian subsidi, pengaturan kuota, hingga regulasi non-tarif lainnya. Perlindungan semacam ini sangat bermanfaat bagi petani, pelaku UMKM, serta sektor industri strategis yang belum sepenuhnya siap bersaing. Akan tetapi, jika dilakukan terlalu ketat, proteksionisme dapat menimbulkan efek samping berupa kenaikan harga barang, inefisiensi produksi, serta penurunan inovasi akibat minimnya kompetisi. Karena itu, penerapannya perlu dilakukan secara hati-hati dan selektif.

Sebaliknya, liberalisasi perdagangan menawarkan keuntungan yang signifikan bagi perekonomian. Melalui keterbukaan pasar, Indonesia berpeluang memperluas ekspor, menarik investasi, serta mempercepat transfer teknologi dan pengetahuan. Namun, konsekuensi yang muncul adalah meningkatnya tekanan bagi industri lokal yang masih kurang kompetitif. Jika tidak diimbangi dengan kebijakan pendukung, liberalisasi berisiko menimbulkan ketergantungan pada impor dan memperlemah kemandirian ekonomi nasional.

Dalam praktiknya, Indonesia tidak hanya berpegang pada salah satu pendekatan, tetapi mencoba menempatkan proteksionisme dan liberalisasi secara berimbang. Pada sektor-sektor vital seperti pangan, proteksi tetap diberlakukan untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan. Sementara itu, pada sektor yang memiliki daya saing ekspor, seperti manufaktur dan komoditas unggulan, pemerintah memberikan insentif, kemudahan regulasi, serta fasilitas perdagangan agar mampu bersaing di pasar global. Pendekatan kombinatorik ini menunjukkan strategi adaptif Indonesia dalam menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi dunia sekaligus melindungi kepentingan domestik.

penelitian ini terletak pada perlunya memahami bagaimana Indonesia menyeimbangkan dua pendekatan tersebut. Ketidakseimbangan dalam kebijakan proteksi dan liberalisasi dapat berdampak pada stabilitas perdagangan, distribusi kesejahteraan, hingga daya saing nasional. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis strategi pemerintah Indonesia dalam mengkombinasikan proteksionisme dan liberalisasi perdagangan sebagai bagian dari kebijakan ekonomi nasional, serta bagaimana kebijakan tersebut berperan dalam menghadapi tantangan dan peluang perdagangan internasional.

Penelitian terdahulu

(Islamiani 2022) meneliti pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap ekspor dan impor Indonesia pada periode 2014-2018. Hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa tarif impor

memiliki pengaruh lebih besar terhadap ekspor dibandingkan pajak ekspor. Selain itu, keduanya sama-sama berpengaruh positif terhadap kegiatan impor. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun perdagangan bebas dapat memperlancar arus barang, kebijakan fiskal seperti tarif tetap berperan penting untuk menjaga stabilitas perdagangan nasional.

Penelitian (Sabaruddin, 2016) membahas dampak liberalisasi perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok dengan memanfaatkan model SMART dan Social Accounting Matrix (SAM). Penelitiannya menemukan bahwa meskipun liberalisasi mendorong peningkatan volume perdagangan bilateral, pengaruhnya terhadap kesejahteraan rumah tangga di Indonesia justru bersifat negatif. Hal ini terjadi karena produk impor asal Tiongkok lebih kompetitif, sementara daya saing produk ekspor Indonesia masih lemah, sehingga keuntungan liberalisasi tidak sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat domestik.

(Hidayat, 2016) melalui penelitiannya menyoroti dinamika kerjasama ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota OKI. Dengan menggunakan pendekatan GTAP, ia menunjukkan bahwa liberalisasi berdampak berbeda-beda pada setiap sektor. Ada sektor industri yang diuntungkan, tetapi ada pula yang tertekan akibat terbukanya pasar. Walau demikian, secara keseluruhan liberalisasi penuh dinilai lebih memberikan keuntungan, meskipun tetap ada kebutuhan proteksi bagi sektor tertentu agar mampu bertahan menghadapi persaingan global.

Jika ditinjau dari ketiga penelitian tersebut, liberalisasi perdagangan memberikan peluang sekaligus tantangan bagi perekonomian Indonesia. Kesamaannya, semua penelitian menekankan pentingnya kebijakan pemerintah untuk menyeimbangkan manfaat keterbukaan perdagangan dengan perlindungan terhadap sektor domestik. Perbedaannya, (Islamiani, 2022) lebih menyoroti instrumen tarif dan pajak, (Sabaruddin, 2016) fokus pada kesejahteraan rumah tangga akibat perdagangan bilateral, sedangkan (Hidayat, 2016) menelaah efek liberalisasi dalam kerangka kerjasama multilateral. Celah penelitian yang muncul adalah minimnya pembahasan tentang peran proteksionisme. Karena itu, penelitian mengenai bagaimana Indonesia menyeimbangkan proteksionisme dan liberalisasi perdagangan menjadi penting untuk mengidentifikasi strategi terbaik dalam menghadapi dinamika perdagangan internasional.

Tinjauan Pustaka

1. Proteksionisme

Proteksionisme merupakan kebijakan yang diterapkan oleh suatu negara untuk melindungi pasar dalam negeri dari persaingan pasar global. Salah satu cara yang umum digunakan dalam kebijakan ini adalah penerapan berbagai regulasi yang membatasi atau mengatur kegiatan impor dan ekspor, seperti penetapan tarif, pemberian subsidi, serta pengendalian mutu barang (Fitriyanti et al., 2023). Menurut (Fathun, 2017) Proteksionisme merupakan langkah yang dilakukan oleh suatu negara untuk melindungi atau membatasi akses pasar domestiknya, dengan tujuan agar produk-produk dalam negeri dapat berkembang dan tidak tersisih akibat masuknya barang-barang impor dari luar negeri. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat daya saing produk nasional di pasar global.

2. Liberalisme

Menurut (Sjamsudin dalam jurnal Budiyantri, 2019) Liberalisme perdagangan, atau yang dikenal juga sebagai perdagangan bebas (*free trade*), adalah suatu keadaan dimana suatu negara melakukan aktivitas perdagangan dengan negara lain tanpa adanya hambatan atau batasan. Proses menuju terciptanya kondisi perdagangan tanpa sekat inilah yang disebut sebagai liberalisasi perdagangan. Sedangkan menurut (Azizah dkk, 2024) Liberalisasi perdagangan adalah proses pengurangan atau penghapusan hambatan perdagangan antarnegara, seperti tarif, kuota, subsidi, dan regulasi non-tarif, dengan tujuan menciptakan pasar global yang lebih terbuka dan kompetitif. Konsep ini menekankan perdagangan barang dan jasa antarnegara yang berlangsung secara bebas, dengan mengurangi atau bahkan menghilangkan berbagai pembatasan yang menghalangi arus perdagangan.

3. Kebijakan Ekonomi

Kebijakan ekonomi merupakan seperangkat aturan atau ketentuan yang ditetapkan pemerintah terkait aktivitas perekonomian. Kebijakan ini diarahkan untuk mengatur jalannya roda ekonomi dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas (Masrufah, 2022). Sedangkan menurut (KBBI (2016), kebijakan ekonomi dapat dipahami sebagai keputusan atau langkah yang ditetapkan oleh suatu kelompok, organisasi, instansi, maupun pemerintah dengan tujuan mengatur serta mengendalikan aktivitas dan perkembangan perekonomian di suatu wilayah atau negara.

Kajian Literatur

Proteksionisme merupakan kebijakan yang ditempuh negara untuk melindungi pasar domestik dari tekanan persaingan internasional. (Fitriyanti dkk, 2023) menyebutkan bahwa bentuk proteksi dapat dilakukan melalui penetapan tarif, subsidi bagi produsen dalam negeri, serta aturan non-tarif seperti standar mutu atau pembatasan impor. Sementara itu, (Fathun 2017) menjelaskan bahwa proteksionisme bertujuan agar produk lokal mampu bertahan dan berkembang tanpa tergeser oleh produk asing. Dengan demikian, kebijakan proteksi tidak hanya sekedar pembatasan, tetapi juga strategi memperkuat daya saing produk nasional.

Berbeda halnya dengan proteksionisme, liberalisasi perdagangan menekankan pada keterbukaan pasar dan penghapusan hambatan dalam aktivitas perdagangan antarnegara. (Sjamsudin dalam Budiyantri 2019) mendefinisikan perdagangan bebas sebagai kondisi di mana perdagangan dilakukan tanpa adanya batasan, sedangkan (Azizah dkk, 2024) menekankan bahwa liberalisasi diwujudkan dengan mengurangi atau bahkan menghapus tarif, kuota, subsidi, dan hambatan non-tarif lainnya. Tujuan dari kebijakan ini adalah menciptakan pasar global yang kompetitif serta meningkatkan efisiensi dan akses pasar, meskipun di sisi lain dapat menimbulkan tekanan pada industri dalam negeri yang belum siap bersaing.

Kebijakan ekonomi sendiri merupakan payung besar dari berbagai strategi perdagangan. (Masrufah, 2022) menjelaskan bahwa kebijakan ekonomi adalah seperangkat aturan yang ditetapkan pemerintah untuk mengatur jalannya roda perekonomian dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan (KBBI 2016) yang mendefinisikan kebijakan ekonomi sebagai keputusan atau tindakan yang dibuat oleh pemerintah, organisasi, maupun instansi untuk mengawasi sekaligus mengendalikan

aktivitas perekonomian dalam suatu wilayah. Artinya, kebijakan ekonomi menjadi instrumen penting untuk menentukan kapan suatu negara menerapkan proteksi atau justru membuka diri pada perdagangan bebas.

Dari berbagai literatur tersebut dapat disimpulkan bahwa proteksionisme dan liberalisasi bukanlah pilihan yang berdiri sendiri, melainkan dua pendekatan yang dapat dipadukan sesuai konteks dan kebutuhan. Proteksi selektif dibutuhkan untuk melindungi sektor strategis atau industri yang masih berkembang, sedangkan liberalisasi diperlukan guna mendorong efisiensi, inovasi, dan integrasi dalam pasar global. Oleh karena itu, kombinasi keduanya sering digunakan oleh negara-negara agar mampu menyeimbangkan kepentingan domestik dengan tuntutan keterbukaan ekonomi internasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis upaya Indonesia dalam menyeimbangkan kebijakan proteksionisme dan liberalisasi perdagangan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan berbagai sumber relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, laporan kebijakan pemerintah, dan dokumen resmi terkait topik penelitian.

Hasil Pembahasan

Proteksionisme menjadi salah satu kebijakan strategis Indonesia untuk melindungi industri domestik yang masih menghadapi tekanan persaingan global. Pemerintah melaksanakan berbagai langkah, seperti penerapan tarif impor pada produk strategis dan komoditas lokal, pemberian subsidi kepada sektor industri dan pertanian, serta regulasi non-tarif berupa standar mutu dan sertifikasi produk. Sebagai contoh, tarif impor beras dan gula diberlakukan untuk menjaga kestabilan harga sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasokan luar negeri. Perlindungan semacam ini membantu industri kecil dan menengah, termasuk sektor tekstil dan kerajinan, agar tetap mampu bersaing dengan produk impor yang lebih murah. Meski demikian, proteksionisme yang terlalu ketat dapat menimbulkan konsekuensi negatif, seperti kenaikan harga barang di dalam negeri dan penurunan efisiensi produksi.

Proteksionisme dapat memberikan dampak signifikan terhadap keseimbangan perdagangan suatu negara. (Meity Estetika 2022) menjelaskan bahwa kebijakan ini mampu membatasi ketersediaan produk impor melalui tarif atau regulasi kualitas, yang pada gilirannya mendorong masyarakat lebih memilih produk lokal. Kondisi ini tidak hanya memperkuat pasar domestik, tetapi juga mempercepat pertumbuhan industri, teknologi, dan sumber daya manusia dalam negeri. Dengan semakin kuatnya basis produksi domestik, daya saing produk nasional meningkat sehingga berpotensi memperbaiki neraca perdagangan. Namun demikian, efektivitas proteksionisme sangat bergantung pada kemampuan negara menjaga keseimbangan antara perlindungan jangka pendek dan upaya membangun daya saing jangka panjang di pasar global.

Sementara itu, liberalisasi perdagangan menjadi instrumen penting untuk meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar global bagi Indonesia. Pemerintah mendorong liberalisasi melalui perjanjian perdagangan bebas baik regional maupun bilateral. Contohnya, *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* menurunkan tarif antarnegara ASEAN, Indonesia-Australia *Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)* membuka akses pasar jasa dan investasi, dan perjanjian bilateral dengan Jepang maupun Korea Selatan mendukung ekspor manufaktur, elektronik, dan komoditas pertanian. Selain itu, reformasi prosedur ekspor-impor, seperti penerapan sistem *Online Single Submission (OSS)*, mempermudah pelaku usaha dalam menembus pasar internasional. Liberalisasi ini mendorong industri domestik menjadi lebih efisien, meningkatkan kualitas produk, dan membuka peluang ekspor baru, meskipun sektor yang belum siap bersaing tetap menghadapi tekanan.

Pemerintah Indonesia berupaya menyeimbangkan proteksionisme dan liberalisasi melalui strategi kombinasi yang adaptif. Tarif hanya diberlakukan pada sektor yang membutuhkan perlindungan, sementara sektor berorientasi ekspor mendapat kemudahan. Subsidi dialokasikan bagi industri dan pertanian, sedangkan insentif pajak diberikan untuk mendorong ekspor serta menarik investasi. Dalam perjanjian perdagangan bebas, Indonesia menegosiasikan klausul perlindungan bagi sektor sensitif agar liberalisasi tidak merugikan industri domestik.

Selain itu, penguatan daya saing juga dilakukan melalui modernisasi teknologi, pelatihan SDM, sertifikasi produk, serta diversifikasi pasar dan komoditas untuk mengurangi ketergantungan pada satu negara atau produk tertentu. Contoh nyata terlihat pada proteksi beras, gula, dan jagung untuk menjaga ketahanan pangan, sementara produk unggulan seperti kopi, kakao, dan kelapa sawit difasilitasi aksesnya ke pasar internasional. Inovasi pun didorong, misalnya industri tekstil dengan teknologi ramah lingkungan dan sektor pertanian dengan sistem irigasi modern.

Di samping kebijakan perdagangan, pemerintah juga bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan moneter. Penerapan instrumen makroprudensial dan mikroprudensial berperan penting dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas keuangan nasional. Sinergi ini mampu meminimalisir dampak faktor eksternal, seperti perang dagang, terhadap perekonomian domestik dan pasar modal (Bursa Efek).

Secara keseluruhan, strategi perdagangan dan moneter yang dijalankan secara terpadu memberikan dampak positif bagi Indonesia. Tidak hanya menjaga stabilitas perdagangan dan keuangan, tetapi juga memperkuat daya saing, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan ketahanan ekonomi dalam menghadapi dinamika global.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan antara proteksionisme dan liberalisasi perdagangan di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Proteksionisme masih diperlukan sebagai strategi untuk menjaga keberlangsungan sektor domestik yang rentan, seperti pertanian, UMKM, dan industri padat karya. Melalui kebijakan tarif, subsidi, maupun regulasi non-tarif, pemerintah berupaya memastikan produk lokal tidak tersingkir

oleh dominasi produk impor. Kebijakan ini juga membantu menjaga ketahanan pangan, stabilitas harga, serta melindungi lapangan kerja masyarakat.

Di sisi lain, liberalisasi perdagangan tidak dapat dihindari karena merupakan bagian dari integrasi Indonesia dalam sistem ekonomi global. Melalui perjanjian dagang regional maupun bilateral, seperti AFTA, IA-CEPA, serta kerjasama dengan Jepang dan Korea Selatan, Indonesia memperoleh peluang memperluas pasar, meningkatkan ekspor, serta menarik investasi asing. Liberalisasi juga mendorong efisiensi produksi, peningkatan kualitas produk, dan inovasi industri, meskipun dalam praktiknya tidak semua sektor mampu bertahan menghadapi persaingan yang ketat.

Upaya pemerintah untuk mengkombinasikan proteksi dan liberalisasi menunjukkan adanya strategi adaptif yang menyesuaikan kondisi domestik sekaligus merespons perkembangan global. Proteksi selektif diberikan pada sektor yang sensitif, sementara sektor berorientasi ekspor didorong dengan insentif, kemudahan regulasi, serta fasilitasi akses ke pasar internasional. Pendekatan kombinitif ini memungkinkan Indonesia menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat daya saing, sekaligus meminimalkan dampak negatif dari keterbukaan perdagangan.

Selain itu, kebijakan perdagangan Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan kebijakan ekonomi lainnya, seperti kebijakan moneter dan fiskal. Sinergi antara pemerintah dan Bank Indonesia melalui instrumen makroprudensial dan mikroprudensial berperan penting dalam menjaga inflasi, stabilitas keuangan, dan ketahanan perekonomian nasional. Dengan demikian, strategi yang bersifat holistik mampu menghadirkan keseimbangan antara kepentingan domestik dengan tuntutan globalisasi.

Dengan mempertimbangkan temuan tersebut, dapat ditegaskan bahwa keseimbangan antara proteksionisme dan liberalisasi merupakan pendekatan yang paling relevan bagi Indonesia. Proteksionisme yang selektif dapat melindungi sektor vital, sedangkan liberalisasi yang terukur dapat meningkatkan daya saing dan memperluas peluang ekonomi. Ke depan, tantangan bagi Indonesia adalah memperkuat fondasi industri domestik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperluas diversifikasi pasar agar tidak terlalu bergantung pada komoditas tertentu atau negara mitra dagang tertentu. Dengan langkah tersebut, Indonesia tidak hanya mampu bertahan dalam arus globalisasi, tetapi juga berpotensi menjadi pemain yang lebih kuat di kancah perdagangan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Azizah, W., & Baik, B. N. (2024). MEMAHAMI LIBERALISASI PERDAGANGAN: DAMPAK DAN IMPLIKASINYA DALAM KONTEKS EKONOMI GLOBAL. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 251-265.

Budiyanti, E. (2019). Dampak liberalisasi perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia (The Impact of Trade Liberalisation on Economic Growth in Indonesia). *Kajian*, 22(1), 45-57.

Fitriyanti, R., Judistia, A., Ulvatmi, J., TWA, R. H., & Nurhaliza, S. (2023). DAMPAK PROTEKSIONISME AMERIKA SERIKAT TERHADAP INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KONSTRUKTIVISME. *Emerald: Journal of Economics and Social Sciences*, 2(1), 37-46.

Fathun, L. M. (2017). Proteksionisme Sengketa Dagang Dalam Perdagangan Internasional: Pendekatan Negosiasi Studi Kasus: Proteksionisme As Terhadap Impor Daging Kanada. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 1(1), 15-27.

Hidayat, A. S. (2016). Dinamika kerjasama ekonomi indonesia dengan anggota organisasi konferensi islam (oki): potensi dan pengaruhnya terhadap perekonomian indonesia. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 10(1), 21-44.

Islamiani, Y. (2022). Dampak liberalisasi perdagangan terhadap ekspor dan impor di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Pendidikan (JEBP)*, 2(4), 486-491.

Masrufah, L. (2022). Kebijakan Moneter Fiskal dalam Perekonomian. *Jurnal Qjema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)*, 8(1), 7-22.

Sabaruddin, S. S. (2014). Dampak Liberalisasi Perdagangan RI-China Terhadap Perubahan Perdagangan dan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia: Sebuah Pendekatan Ekuilibrium Parsial (SMART Model) dan Pemanfaatan Sistem Neraca Sosial Ekonomi 2008.

Saifulloh, M. R. (2020). Kebijakan Proteksionisme Indonesia Guna Menstabilkan Iklim Investasi Nasional dan Mengkapitalisasi Kondisi Perang Dagang Amerika Serikat-Tiongkok. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(1), 51-63.